

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Semarang, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang pesat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan populasi. Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan serius, salah satunya adalah meningkatnya jumlah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Munculnya PGOT di ruang publik sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks dan meresahkan, yang tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menciptakan tantangan sosial yang perlu ditangani secara efektif.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang menata urusan pemerintahan dibidang pelayanan sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah (Perwalkot Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021).

Pasal 5 Perwalkot Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 menjelaskan tentang fungsi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, adalah Sebagian besar melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan dalam bidang sosial di Kota Semarang dibantu oleh Lembaga-lembaga pelaksana dibawahnya. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan sosial kepada PGOT.

Selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 106 / HUK / 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial, bahwa Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen

Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki unit pelaksana yaitu Panti sosial Mardi Utomo. Melalui Panti sosial Mardi Utomo, berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan untuk menangani masalah ini, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Salah satu program unggulan adalah “Program Rehabilitasi Sosial PGOT” yang bertujuan untuk mengintegrasikan PGOT ke dalam masyarakat dengan memberikan mereka akses ke pelatihan kerja dan dukungan sosial. Selain itu, Mardi Utomo juga menjalankan program pencegahan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dan relawan untuk mengurangi jumlah PGOT di jalanan.

Proses rehabilitasi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar karena memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan kesehatan mental dan fisik mereka. Banyak individu yang mengalami masalah kesehatan akibat kondisi hidup yang sulit, sehingga rehabilitasi membantu mereka mendapatkan perawatan medis dan terapi psikologis yang diperlukan. Selain itu, program rehabilitasi sering mencakup pelatihan keterampilan dan pendidikan, yang berfungsi untuk meningkatkan peluang kerja dan membantu individu menjadi mandiri secara ekonomi. Pentingnya integrasi sosial juga tidak bisa diabaikan; rehabilitasi membantu individu membangun hubungan sosial yang positif dan mengurangi stigma yang sering mereka hadapi, sehingga memudahkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, rehabilitasi juga berperan dalam mengurangi risiko individu kembali ke jalan, menciptakan jalur keluar yang berkelanjutan dari kemiskinan. Selain itu, proses ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh kelompok ini, mendorong partisipasi dalam solusi yang lebih efektif. Secara keseluruhan, rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk

membantu individu bertahan hidup, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih berdaya saing, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penerapan program rehabilitasi PGOT melibatkan serangkaian *stakeholder* yang masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Instansi-instansi yang terkait dengan program rehabilitasi di Indonesia dimulai dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan dalam hal ini Panti Sosial Mardi Utomo. Ketiga *stakeholder* ini memiliki peran sesuai dengan tupoksinya. Terdapat 5 peran yang diemban oleh para *stakeholder*. Yang pertama yaitu *Policy creator, stakeholder* yang berperan sebagai pembuat dan penentu kebijakan, diemban oleh Kementerian Sosial, yang kedua yaitu *Coordinator, stakeholder* yang memiliki peran dalam mengatur *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan diemban oleh Dinas Sosial, yang ketiga yaitu *Fasilitator, stakeholder* yang berperan untuk membantu dan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran, diemban bersama-sama oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, yang keempat yaitu *Implementor, stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau yang mengimplementasikan dan melaksanakan eksekusi diemban oleh Panti Sosial, yang terakhir yaitu *Akselerator, stakeholder* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar sebuah program dapat beroperasi tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan, yang juga diemban oleh Panti Sosial.

Kedudukan Panti sosial Mardi Utomo telah diterangkan pada Pasal 3 ayat (1) Pergub Nomor 82 tahun 2021 yang menerangkan bahwa Panti Sosial Mardi Utomo sebagai Panti Sosial Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pelayanan Sosial yang berbentuk multi layanan dengan menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

Selanjutnya dalam dijelaskan mengenai kategori Panti Sosial Mardi Utomo yaitu

sebagai Panti Sosial Bina Karya, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 106 / HUK / 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial yang berbunyi “

“Panti Sosial Bina Karya mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.”

Dengan kedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknik Panti Sosial Bina Karya di Departemen Sosial, Panti Sosial Mardi Utomo memiliki tugas yang diterangkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 106 / HUK / 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial yang berbunyi :

“Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya pada Pasal Pada pasal-pasal diatas diterangkan bahwa tugas utama Panti Sosial Mardi Utomo sebagai Panti Sosial Bina Karya adalah untuk mencapai reintegrasi sebaik-baiknya dari masyarakat kategori PGOT agar Kembali kemasyarakat, namun berdasarkan hasil rehabilitasi ternyata hal tersebut sulit dicapai. Sulitnya reintegrasi yang dialami oleh PGOT pasca rehabilitasi dinilai cukup tinggi karena idealnya PGOT pasca rehabilitasi dapat kembali ke masyarakat dengan ketrampilan baru dan keadaan mental yang lebih baik sehingga dapat bekerja dan kembali kemasyarakat. Namun pada realitanya diketahui bahwa PGOT masih kembali ke jalanan bahkan kembali ke Panti sosial Mardi Utomo untuk rehabilitasi.

Tabel 1.1 PGOT Pasca Rehabilitasi oleh PPS Mardi Utomo Semarang

Tahun	Penerima	Reintegrasi Ke	Dibina	Dirujuk antar
-------	----------	----------------	--------	---------------

	Layanan Rehabilitasi	Masyarakat	Kembali	Panti
2020	136	39(28%)	66(48%)	31(24%)
2021	124	39(32%)	44(35%)	41(33%)
2022	110	36(33%)	43(39%)	31(28%)

Sumber : PPS Mardi Utomo Semarang

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah PGOT yang berhasil reintegrasi ke masyarakat dengan ketrampilan baru, sangat sedikit dibandingkan dengan PGOT yang kembali ke jalan lalu direhabilitasi berulang, atau PGOT yang akhirnya di rujuk ke Panti Sosial lain. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan oleh Panti Sosial Mardi Utomo belum menunjukkan peran yang berdampak terhadap PGOT. Terindikasi dari jumlah PGOT yang berhasil reintegrasi ke masyarakat sangat sedikit, hal ini sangat disayangkan dan tentu saja perlu dilakukan adanya analisis peran dan juga mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi yang menyebabkan sulitnya keberhasilan reintegrasi PGOT pasca rehabilitasi.

Rendahnya angka reintegrasi ini memicu adanya pertanyaan tentang efektivitas program rehabilitasi, baik dari sisi pendekatan, keberlanjutan program, maupun dukungan lintas sektor. Dalam konteks ini, Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Kota Semarang, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan fungsi implementasi kebijakan sosial terhadap PGOT. Sebagai ujung tombak pelaksanaan rehabilitasi, keberhasilan atau kegagalan Mardi Utomo dalam melaksanakan tugasnya berdampak langsung pada tingkat keberhasilan reintegrasi sosial PGOT ke masyarakat. Oleh karena itu, meneliti peran Panti Mardi Utomo sebagai implementator menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan fungsinya secara optimal serta memahami faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya sebagai salah satu stakeholder dalam pengelolaan PGOT.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPS Mardi Utomo dalam pelayanan

sosial yang kepada PGOT, dengan fokus pada peran Pantis Sosial Mardi Utomo sebagai implementor, yang terindikasi kurang berdampak karena banyaknya PGOT yang Kembali kejalan setelah melalui rehabilitasi, serta identifikasi kendala dan solusi yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pantis Sosial Mardi Utomo sebagai implementor dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan dampak Pantis Sosial Mardi Utomo dan meningkatkan reintegrasi PGOT di Kota Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Potret kemajuan pada sebuah kota dapat dinilai dari seberapa bersih kota tersebut dari PGOT, dan juga seberapa baik upaya pengelolaan PGOT yang ada di Kota tersebut. Demi kemajuan sebuah wilayah, tentu diperlukan adanya pengelolaan untuk menangani permasalahan PGOT agar pelayanan rehabilitasi yang dilakukan benar-benar berdampak dan menghasilkan reintegrasi yang baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan peran *implementor* Pantis sosial Mardi Utomo dalam pengelolaan PGOT di Kota Semarang?
- b. Kendala apa saja yang mempengaruhi pelaksanaa peran *implementor* Pantis Sosial Mardi Utomo dalam pengelolaan PGOT di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa lebih dalam pelaksanaan peran *implementor* Pantis sosial Mardi Utomo dalam pengelolaan PGOT di Kota Semarang.
- b. Untuk menganalisa lebih dalam mengenai kendala apa saja yang mempengaruhi pelaksanaa peran *implementor* Pantis Sosial Mardi Utomo dalam pengelolaan PGOT di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Memperdalam pemahaman mengenai ilmu pengetahuan yang diperoleh di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro khususnya mengenai ilmu administrasi publik.

b. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah sudut pandang baru, konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial di Kota Semarang dan Panti Sosial Mardi Utomo Kota Semarang dalam upaya melakukan pengelolaan PGOT di Kota Semarang yang baik dan efektif.
- b. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Kota Semarang yaitu memberikan sumbangan untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan perkotaan sebagai dasar dari pengelolaan PGOT, selain itu juga dapat memberikan pandangan baru dalam pemberian pelatihan kerja pada PGOT. Penelitian ini penting dilakukan bagi pembangunan Kota Semarang terutama yang berkaitan dengan tantangan dalam upaya pengelolaan PGOT di Kota Semarang.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang menghasilkan berbagai macam hasil penelitian. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul pembahasan pada penelitian ini.

Judul	Tujuan dan Metode	Teori yang digunakan	Hasil	Perbedaan
PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NONGKOSAWIT KOTA SEMARANG (2022) Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata nongkosawit	Teori Peran Stakeholder Nugroho et al, 2014. policy creator, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator	Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat lima peran pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, yaitu pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah POKDARWIS Kandang Gunung, Budaya Kota Semarang dan Dinas Pariwisata, Desa Nongkosawit, Bappeda Kota Semarang, Disporapar Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Jawa Tengah, Universitas Negeri Semarang, Wisatawan, dan komunitas Nongkosawit.	Penelitian ini menjelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing stakeholder dan dampak yang dihasilkan
PERAN STAKEHOLDERS DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI STUDI KASUS DI	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholders dalam mencegah pernikahan dini pada masa pandemi dengan	Teori Peran Stakeholder Nugroho et al, 2014. policy creator, koordinator, implementor,	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beragam peran yang dimainkan dalam analisis stakeholder yang dilakukan. Peran	Penelitian ini menganalisis peran stakeholder sebagai coordinator dan fasilitator.

Judul	Tujuan dan Metode	Teori yang digunakan	Hasil	Perbedaan
KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN (2023) Talitha Mulya, Argo Pambudi	studi kasus di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.	fasilitator, serta akselerator	sebagai koordinator, fasilitator, dan pelaksana telah dilaksanakan dengan cukup baik, dengan masing-masing pihak menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, seperti lembaga pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat, dalam upaya bersama untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kolaborasi ini menunjukkan adanya kerja sama yang terorganisir, di mana setiap pihak saling mendukung dan berkontribusi dalam menciptakan program pencegahan yang berkelanjutan dan berdampak positif	

Judul	Tujuan dan Metode	Teori yang digunakan	Hasil	Perbedaan
			bagi masyarakat setempat	
PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG (2023) Amanda Elista, Kismartini & Amni Zarkasyi Rahman	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran setiap stakeholder dalam program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang.	Teori Peran Stakeholder Nugroho et al, 2014. policy creator, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator	Hasil identifikasi stakeholder menunjukkan pembagian peran sebagai berikut: a) stakeholder pemerintah berfungsi sebagai pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, dan implementor. Dalam pelaksanaan peran tersebut, ditemukan beberapa faktor penyebab tingginya angka KDRT, antara lain faktor ekonomi, budaya patriarki, dan kompleksitas Kota Semarang sebagai kota yang sangat beragam. b) Stakeholder lembaga masyarakat, yang berperan sebagai fasilitator dan implementor, mengidentifikasi bahwa tingginya angka KDRT juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat Kota Semarang untuk melapor. c) Stakeholder swasta, berperan	Penelitian ini menganalisis tugas dan fungsi pokok masing-masing stakeholder

Judul	Tujuan dan Metode	Teori yang digunakan	Hasil	Perbedaan
			sebagai akselerator, telah menjalankan fungsinya dengan baik, khususnya melalui program CSR yang turut mendukung penanganan masalah KDRT	
Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang (2021) Masyhurah, Tri Yuningsih, Ida Hayu DM.	menganalisa peran stakeholder dan mengetahui faktor penghambat peran stakeholder.	Teori Peran Stakeholder Nugroho et al, 2014. policy creator, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai pencipta kebijakan, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator dalam upaya perlindungan anak. Sementara itu, PPT SERUNI, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA berperan sebagai implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator dalam menjalankan program perlindungan anak. Adapun OPD, Rumah Duta Revolusi Mental, rumah sakit, akademisi, dan Bhabinkamtibmas memainkan peran sebagai fasilitator dan akselerator	Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak semua peran berjalan dengan baik, terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan peran

Judul	Tujuan dan Metode	Teori yang digunakan	Hasil	Perbedaan
			dalam hal perlindungan anak dan reintegrasi sosial. Beberapa faktor penghambat reintegrasi sosial bagi korban kekerasan pada anak antara lain adalah kultur masyarakat yang masih mendiskriminasi korban, terbatasnya anggaran untuk program reintegrasi, trauma pada korban yang membuat mereka enggan untuk kembali ke sekolah atau ke panti sosial, serta regulasi yang masih lemah terkait reintegrasi sosial.	
Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lansia (Studi Pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa) (2017) SANGAJI, AYU INDIRA	Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masuknya seorang lansia ke panti sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa., (ii) Untuk mengetahui program pelayanan dan penanganan Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa, (iii) Untuk	Teori Peran Stakeholder Nugroho et al, 2014. policy creator, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) faktor-faktor yang menyebabkan lanjut usia memasuki panti sosial meliputi faktor internal dan eksternal, seperti keinginan pribadi, ketiadaan keluarga, dan kemiskinan; (ii) pelayanan yang diberikan di panti sosial berjalan dengan baik,	Penelitian ini berfokus pada keadaan lansia bukan pada pelaku pelayanan terhadap lansia.

Judul	Tujuan dan Metode	Teori yang digunakan	Hasil	Perbedaan
	mengetahui interpretasi seorang lansia dalam kehidupan sehari-hari di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa		terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar, kesehatan, dan kebutuhan spiritual para penghuni; (iii) pandangan lanjut usia mengenai kehidupan di dalam PSTW Gau Mabaji Gowa tercermin melalui ungkapan-ungkapan mereka, yang mengharapkan agar pelayanan yang diberikan dapat terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.	

Pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam riset ini. Beberapa penelitian mengalisa program kerja dinas sosial tanpa menganalisa peran-peran program tersebut dan tidak mencatatkan perkembangan pengelolaan yang jelas. Beberapa penelitian juga tidak menjelaskan hambatan atau tantangan yang terjadi didalam proses pengelolaan PGOT. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa mendalam terhadap program-program Dinas Sosial, peran-peran yang muncul dalam program tersebut untuk mengukur peran Dinas Sosial, serta tantangan yang terjadi sekaligus.

1.6. Kerangka Teori

Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor lintas sektor—baik dari unsur pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas lokal—dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak atau lembaga pemerintah secara terpisah. Isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, pengangguran, hingga masalah PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar), merupakan contoh klasik permasalahan yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan kolaboratif.

Collaborative governance merupakan suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor non-pemerintah, dan masyarakat dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan publik. Menurut Ansell dan Gash (2007), collaborative governance terjadi ketika aktor-aktor dari berbagai sektor terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan melalui proses yang kolektif, partisipatif, dan berbasis konsensus. Dalam konteks pengelolaan PGOT, persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi antara berbagai stakeholder, termasuk Dinas Sosial, lembaga layanan sosial seperti PPS Mardi Utomo, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal.

Sebagai implementor atau unit pelaksana teknis dari kebijakan rehabilitasi sosial, PPS Mardi Utomo memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga pola kolaborasi tersebut. Penilaian terhadap peran Mardi Utomo dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana lembaga ini berfungsi sebagai penggerak kolaborasi lintas sektor, misalnya melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan sosial lainnya, keterlibatan dalam forum lintas instansi, atau upaya menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam proses reintegrasi PGOT. Melalui lensa

collaborative governance, didapatkan Gambaran tentang bagaimana PPS Mardi Utomo menjalankan peran dalam Kerjasama antar dinas pada agenda pengelolaan PGOT.

Dengan demikian, teori collaborative governance menjadi kerangka yang tepat untuk menilai apakah PPS Mardi Utomo telah berperan sebagai aktor yang tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga membangun kerja sama strategis dan kolaboratif guna menciptakan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah PGOT.

Implementasi Kebijakan Publik

Definisi implementasi kebijakan publik menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier yang disampaikan dalam buku Wahab (2015: 65) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam berbagai tingkatan pemerintahan untuk merealisasikan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Mereka menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekadar pelaksanaan formal dari kebijakan, tetapi juga mencakup proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar lembaga pemerintahan.

Mazmanian dan Sabatier menggambarkan implementasi kebijakan sebagai proses yang kompleks, yang melibatkan hubungan antara banyak *stakeholder*, mulai dari pembuat kebijakan, birokrasi, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini adalah :

1. Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur.
2. Kepentingan dan komitmen *stakeholder*, seperti pembuat kebijakan, aparat birokrasi, dan masyarakat yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
3. Kondisi eksternal, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
4. Kemampuan koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Menurut Gordon dalam (Keban, 2014: 76), implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai proses di mana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh birokrasi atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Gordon menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya tentang pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan interaksi antara berbagai *stakeholder* yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Beberapa aspek penting dalam definisi implementasi kebijakan menurut Gordon adalah:

1. Proses yang berkesinambungan: Implementasi kebijakan tidak terjadi dalam satu langkah atau periode waktu saja, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang berlangsung selama kebijakan dijalankan.
2. Penerjemahan kebijakan: Kebijakan yang telah dirumuskan harus diubah menjadi tindakan praktis yang bisa dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, seperti pejabat pemerintah, lembaga terkait, dan bahkan masyarakat.
3. Peran birokrasi: Birokrasi atau aparat pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena mereka yang akan langsung mengelola dan mengeksekusi kebijakan di lapangan.

Peran *Stakeholder*

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2012:37) peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.

Menurut Riyadi (Ahmad Riyadi, 2012:42), peran dapat didefinisikan sebagai konsep atau pedoman dari suatu bidang yang dikejar oleh sekelompok orang tertentu dalam suatu situasi

sosial. Karena kebijakan ini, semua pemain, baik individu maupun kelompok, akan dapat menyesuaikan perilaku mereka dengan harapan orang lain atau lingkungan sekitar. Selain itu, peran dapat digambarkan sebagai seperangkat aturan, pedoman, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Sebagai rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu, hakikatnya peran dapat diumuskan. Karakter seseorang juga memengaruhi bagaimana pekerjaan tertentu harus dilakukan. Strategi apa pun yang digunakan untuk menjalankan tugas, pimpinan tingkat atas, menengah, atau bawah akan memiliki strategi yang serupa.

Dalam bukunya "Strategic Management: A *Stakeholder Approach*" (1984), R. Edward Freeman mendefinisikan *stakeholder* sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keputusan, tindakan dan hasil dari suatu organisasi. Dalam hal ini, pemerintah dan seluruh jajaran dalam Dinas Sosial dan juga Lembaga dibawahnya yaitu Panti Sosial Mardi Utomo merupakan *stakeholder* yang melaksanakan dan juga menginginkan adanya hasil positif dari program yang dilakukan.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap kedudukan akan diikuti oleh peran yang akan menjadi tanggung jawab dari pengemban kedudukan tersebut. Yang dimaksud dengan peran *stakeholder* adalah bagaimana *stakeholder* menjalankan kewajibannya dan pekerjaannya, menjalankan peranannya untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga tercapai tujuan dan mencapai dampak yang diinginkan.

Selain berbagai sudut pandang *stakeholder* diatas, *stakeholder* juga mempunyai perannya masing-masing dalam mencapai keberhasilan suatu program. Menurut Nugroho (2014) mengklasifikasikan peran *stakeholder* sebagai berikut:

Menurut Nugroho (2014) mengklasifikasikan peran tersebut sebagai berikut :

- a. *Policy creator*, peran yang dijalankan ketika membuat dan mengesahkan kebijakan program atau SOP yang akan dijalankan dalam melaksanakan program.
- b. *Coordinator*, peran yang dilaksanakan saat mengkoordinasi para anggota dalam

menjalankan program.

- c. *Fasilitator*, peran yang dijalankan saat memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan program guna mencapai tujuan.
- d. *Implementor*, peran yang dijalankan saat mengimplementasikan kebijakan dan mengimplementasikan program yang telah dirancang.
- e. *Akselerator*, peran yang dijalankan dalam upaya mempercepat dan memberikan kontribusi lebih agar sebuah program dapat mencapai tujuan sesuai jadwal bahkan lebih cepat.

Seperti yang telah diterangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 106 / HUK / 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial, bahwa Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini menjelaskan bahwa Kemensos berperan sebagai *policy creator*, Dinsos berperan sebagai *coordinator* yang menghubungkan antara Panti Sosial dan Kementrian Sosial, Kemensos dan Dinsos Bersama-sama berperan sebagai *fasilitator* yang menyalurkan segala kebutuhan baik dana maupun SDM yang dapat membantu seluruh program, Panti Sosial berperan sebagai *implementor* sekaligus *akselerator* yang bertugas mengimplementasikan seluruh kebijakan kedalam suatu proses rehabilitas, dan juga mempercepat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam konsepsi Peran Stakeholder (Nugroho, 2014) yang telah diterangkan sebelumnya, Panti Sosial Mardi Utomo memiliki kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam pengelolaan PGOT. Dalam hal ini, Pergub Nomor 82 tahun 2021 telah mengatur tugas pokok Panti Sosial Bina Karya Mardi Utomo Semarang yaitu : memberikan bimbingan,

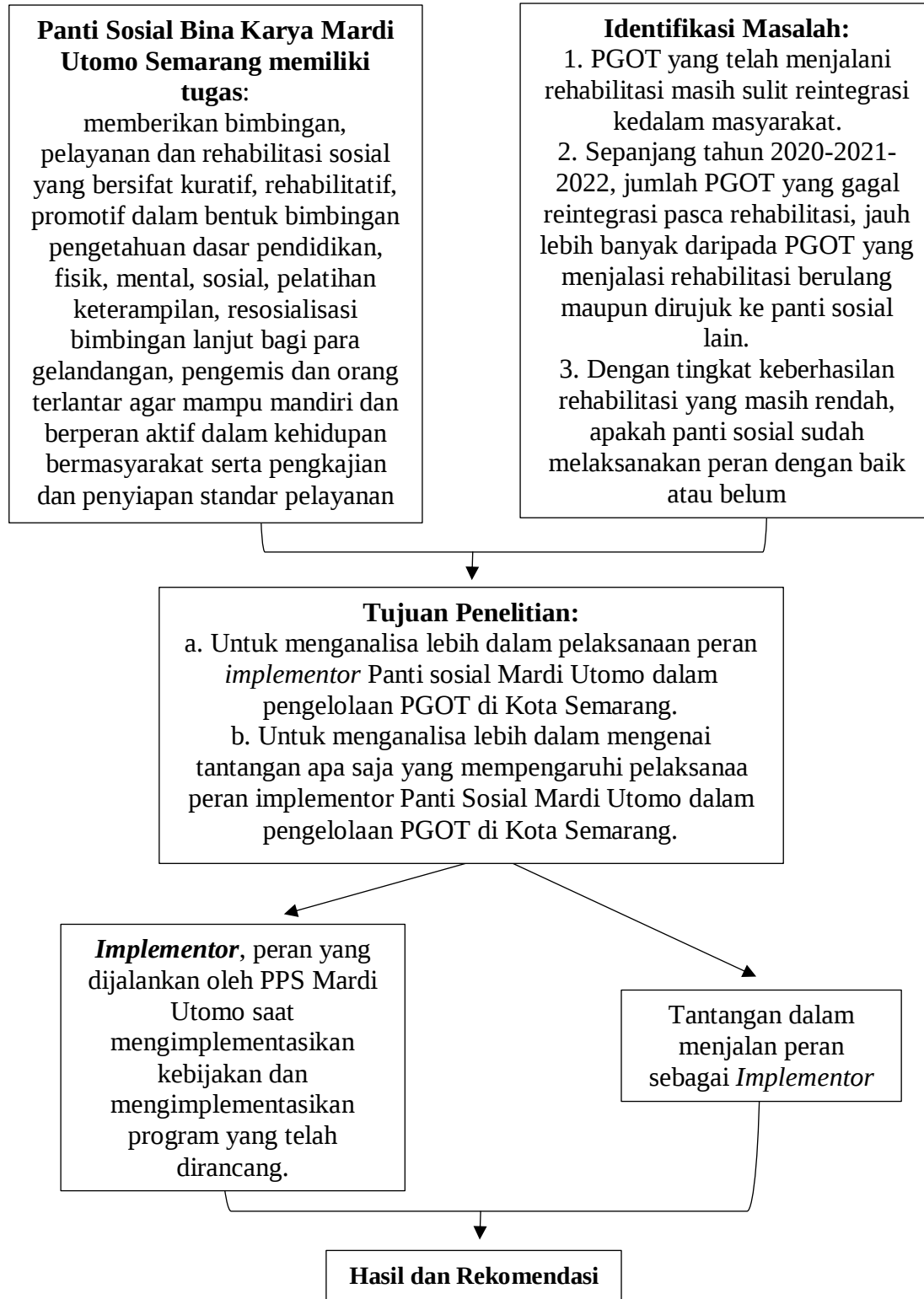
pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Peran Panti Sosial sebagai *implementor* adalah bertugas mengimplementasikan regulasi dan mewujudkan keberhasilan program serta mempercepat dicapainya tujuan program tersebut, untuk mengetahui seberapa baik panti sosial Mardi Utomo menjalankan peran sebagai *implementor* pengukuran akan dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu:

Peran Panti Sosial Mardi Utomo sebagai *implementor*:

- a. bagaimana Panti Sosial Mardi Utomo mengimplementasikan program rehabilitasi sesuai dengan regulasi tentang rehabilitasi (bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut),
- b. bagaimana kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan realitas program ketika dilaksanakan,
- c. bagaimana keberlanjutan program rehabilitasi yang di implementasikan (resosialisasi bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat),
- d. kendala apa yang terjadi dalam proses implementasi program rehabilitasi tersebut.

1.8 Kerangka Berpikir Teoretis



Pada kerangka berpikir diatas diterangkan bahwa dalam proses pengelolaan PGOT yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, akan ditelaah menggunakan konsep Peran Stakeholder. Proses penanganan PGOT oleh Dinas Sosial akan ditelaah berdasarkan kesesuaian praktek lapangan dengan peran yang dijalankan oleh Panti Sosial Mardi Utomo. Pada penelitian ini akan dikaji bagaimana Panti Sosial Mardi Utomo menjalankan peran sebagai *implementor* pada penanganan PGOT di Kota Semarang. Selain itu, akan ditelaah pula tantangan-tantangan yang terjadi dalam proses pengelolaan PGOT di Kota Semarang.

1.9. Argumen Penelitian

Proses pengelolaan PGOT di Kota Semarang dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya, namun belum menghasilkan efektivitas pengelolaan yang maksimal karena adanya berbagai keterbatasan. Penelitian ini akan membantu mengevaluasi sejauh mana panti sosial menjalankan peran mereka sebagai implementor (pelaksana) program rehabilitasi PGOT. Dengan memahami peran panti sosial lebih mendalam, dapat diketahui lebih lanjut apakah panti sosial memiliki sumber daya, kapasitas, dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan program dengan efektif. Dengan menggali peran panti sosial, akan terungkap tantangan yang dihadapi panti sosial dalam menjalankan program rehabilitasi, baik yang bersifat internal (seperti kurangnya staf, pelatihan, atau fasilitas) maupun eksternal (seperti kurangnya dukungan dari masyarakat atau keterbatasan anggaran). Mengidentifikasi hambatan-hambatan ini akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang area yang perlu diperbaiki agar program lebih efektif. Hasil penelitian juga dapat digunakan untuk menyarankan perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi, dan penguatan hubungan antara panti sosial dan stakeholder lainnya.

1.10. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fenomena atau peristiwa yang diteliti. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan persepsi yang muncul dari data yang dikumpulkan, seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran utuh mengenai objek kajian sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

1.10.1 Pendekatan Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif rasionalistik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif, cakupan dan kedalaman pengamatan sangat penting karena berhubungan dengan perilaku dan karakter masyarakat (Lexy Moleong, 2000). Menurut Muhadjir (1996), kerangka teori dibangun dari konsep-konsep yang terbentuk melalui pemahaman empiris secara kritis, baik secara logis maupun etis. Penjabaran konsep sangat diperlukan dalam mengungkap substansi empiris. Upaya untuk memperoleh deskripsi penelitian yang tepat dilakukan melalui proses konseptualisasi yang ditarik dari fenomena-fenomena konkret secara konsisten.

1.10.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Proses pengumpulan data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi. Arikunto (2010) juga menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memandang objek penelitian sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, yang kemudian dideskripsikan sesuai dengan fenomena yang terjadi. Sementara itu, Bungin (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pentingnya sikap kritis dari peneliti sepanjang proses penelitian. Sikap kritis ini

membantu peneliti dalam menggali informasi secara maksimal. Berdasarkan pandangan Kant yang dikutip oleh Bungin, sikap kritis merupakan hasil dari kerja intelektual yang intens dan menjadi landasan penting dalam memperoleh data secara menyeluruh. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, karena topik yang dibahas berfokus pada proses dan memerlukan pengamatan mendalam terhadap kejadian yang berlangsung. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang terperinci, objektif, dan jelas terkait peran Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo sebagai *implementor* dalam pengelolaan PGOT di Kota Semarang.

1.10.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau wilayah yang dipilih saat melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Panti Sosial Mardi Utomo, dan PGOT yang berada di wilayah Kota Semarang.

1.10.4 Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama atau sasaran yang dikaji dalam suatu studi ilmiah, yang dapat berupa individu, kelompok, lembaga, peristiwa, atau fenomena tertentu. Objek penelitian menjadi titik sentral dalam pengumpulan dan analisis data, karena darinyalah peneliti berusaha menggali informasi untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Panti Pelayanan Sosial (PPS) Mardi Utomo. Penelitian difokuskan pada peran PPS Mardi Utomo sebagai implementor dalam pengelolaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kota Semarang. Artinya, penelitian ini mengkaji bagaimana PPS Mardi Utomo menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan secara konkret (sebagai implementor).

1.10.5 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dari informan-informan sedangkan data

sekunder yang digunakan adalah buku-buku, perundang-undangan, penelitian terdahulu, laporan-laporan dan berbagai tulisan lain.

1.10.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Informan kunci, dengan kriteria:
 - a. Kepala Panti Sosial Mardi Utomo Kota Semarang
 - b. Kepala Sub-Bagian Pelayanan dan Rehabsos Panti Sosial Mardi Utomo Kota Semarang
2. Informan utama, dengan kriteria:
 - a. Masyarakat PGOT yang pernah mengikuti rehabilitasi di Panti Sosial Mardi Utomo Kota Semarang

2. Sumber Data Sekunder

Selain informan yang dijadikan sebagai sumber data, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis dan pemahaman terhadap objek yang dikaji. Sumber data sekunder merujuk pada data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Adapun jenis sumber data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penanganan PGOT, buku-buku ilmiah yang membahas teori dan konsep terkait implementasi kebijakan sosial dan peran *stakeholder*, laporan tahunan dari Panti Pelayanan Sosial (PPS) Mardi Utomo yang memberikan gambaran tentang program kerja dan capaian lembaga, serta jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran lembaga sosial sebagai *stakeholder*, implementasi kebijakan, dan penanganan permasalahan sosial di masyarakat.

Semua sumber ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, membandingkan temuan, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap hasil penelitian.

1.10.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan mendalam terkait objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak kunci, termasuk kepala bagian dan kepala subbagian yang memiliki tanggung jawab dan pemahaman langsung terhadap pelaksanaan program-program di Panti Pelayanan Sosial (PPS) Mardi Utomo, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kota Semarang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, namun tetap bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga memungkinkan penyesuaian dan pengembangan pertanyaan berdasarkan dinamika serta konteks yang terjadi di lapangan (Notoadmodjo, 1993: 97–103).

Dalam prosesnya, peneliti melibatkan dua jenis informan, yaitu informan kunci, informan pelengkap. Informan kunci adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sementara informan pelengkap memberikan informasi tambahan yang relevan terkait keadaan kontekstual di lapangan. Keterlibatan ketiga jenis informan ini dimaksudkan untuk memperkaya data, menghindari bias, serta memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, teknik ini juga berfungsi sebagai kontrol untuk menjaga agar fokus penelitian tetap pada isu yang sedang dikaji dan tidak menyimpang dari rumusan masalah.

Wawancara mendalam ini digunakan secara khusus untuk menggali bagaimana proses implementasi pengelolaan PGOT dilakukan oleh PPS Mardi Utomo, kendala yang dihadapi, strategi yang digunakan, serta bagaimana peran lembaga ini sebagai implementor dan akselerator dalam konteks kebijakan sosial. Data yang diperoleh melalui wawancara

selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan kriteria dan teori yang telah ditetapkan sebelumnya, guna mengetahui sejauh mana kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kerangka penelitian yang digunakan.

1.10.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan tujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dan observasi langsung di lapangan dianalisis dengan cara mereduksi data, menyusun kategori, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola atau tema yang muncul. Sementara itu, data sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pendukung dalam proses interpretasi data primer. Data sekunder ini juga berfungsi sebagai rujukan teoritis dan kontekstual untuk memperkuat validitas temuan. Seluruh proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga tahap akhir penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1.10.9. Kualitas Data

Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode untuk menguji validitas data dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber atau metode yang berbeda. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti laporan tahunan, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan mengkaji data dari berbagai sudut pandang ini, peneliti dapat meminimalkan bias dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh bersifat konsisten, akurat, dan dapat dipercaya. Selain itu, triangulasi juga membantu memperkuat interpretasi data dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, khususnya terkait peran PPS Mardi Utomo sebagai implementor dalam pengelolaan PGOT di Kota Semarang.